

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Kecamatan Manggala)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SURIYADI

NIM: 10500113102

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suriyadi
Nim : 10500113102
Tempat/Tanggal lahir : Belawa-wajo, 10 September 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum/ S1
Alamat : BTN Cluster Berlian Permai No.6
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Terhadap Pembantu Rumah Tangga(studi kasus kecamatan
manggala).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 November 2018

Penyusun



Suriyadi
Nim:10500113102

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga(studi kasus kecamatan manggala)." yang disusun oleh Suriyadi, Nim: 10500113102, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 21 November 2018 M, bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 21 November 2018 M
13 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I	(.....)
Munaqisy II	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Irfan, S.Ag., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga (studi kasus kecamatan Manggala)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku pimpinan tertinggi beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamduddin, M.Ag. selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ashabul Kahpi, S.H, M.H. selaku Pembimbing I dan Irfan S.Ag, M.H. selaku pembimbing II, Prof. Dr. Kasjim Salenda, S.H, M.Th.I. selaku Penguji I dan Rahman Syamsuddin, S.H, M.H. selaku penguji II yang telah dengan sabar,

tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penyusun selama menyusun skripsi.

4. Ibu Istiqamah, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Yammulia (Gian), Irwan, Adam, Firman Om Roger, Fahmi Camba, Lord Oji, Takbir, Febri, Rofi, Arif, Opik, Callu, Fandi, Tia', Cuwa, Budi, Rais beserta sahabat-sahabat lain yang tidak sempat disebutkan yang telah banyak membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ica, Sulfi, Dinda, Winda, Putri Ramadhani, Ayu, Riza, Ika yang telah banyak membantu.
7. Ketua RKM batua ibu Nrlinda, Kak Bram, Ibu Erni, Mba Ross, Anti yang turut membantu memberikan masukan selama penyusunan skripsi.
8. Bapak Suryo Atmono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, beserta seluruh Jaksa dan staf yang ada di Kejaksaan Negeri Enrekang yang banyak membantu dalam Praktek Pengenalan Lapangan (PPL).
9. Rekan-Rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya Jurusan Ilmu Hukum; Mediator 2013.
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penyusun, terkhusus pada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Kaharuddin dan Ibunda H. Suriyani. Dan juga kepada saudara/i saya

Maryani, Masriyani, Mulyani dan Zulkarinanda, mengucapkan banyak terima kasih atas doa restu yang tulus yang diberikan kepada penyusun.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini. Semoga penyusunan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 20 November 2018

Penyusun

SURIYADI
NIM.10500113102

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah Pengimplementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pembantu rumah tangga di kecamatan manggala. (2) Apa saja faktor penghambat yang ditemui dalam Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pembantu rumah tangga di Kecamatan Maggala.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga. Bahwa Undang-Undang ini kurang efektif melindungi PRT hal ini dapat kita lihat tidak ada aturan dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang aspek ketenaga kerjaan seperti jam kerja hari libur dan standar gaji. Kemudian dapat kita lihat dalam Pasal 2 Menyatakan bahwa Undang-undang ini tidak saja terbatas untuk melindungi perempuan yang berstatus isteri saja, namun juga suami dan juga anak serta orang-orang lain yang mempunyai hubungan tertentu seperti pembantu rumah tangga. (2) Faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kecamatan Manggala yaitu, Faktor Pola fikir yang konvensional, faktor Kurangnya sosialisasi, faktor Korbannya, faktor Hukumnya sendiri.

Pemerintah perlu memperbaharui atau menambahkan suatu peraturan yang didalamnya tidak saja sebatas untuk melindungi perempuan yang berstatus isteri saja namun juga suami dan juga anak serta orang-orang lain yang mempunyai hubungan tertentu khususnya pembantu rumah tangga yang kerap menjadi korban kekerasan. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat termasuk yang berstatus sebagai pembantu rumah tangga, akan Faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kecamatan Manggala.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Kekerasan	12
B. Kejahatan Dari Sudut Pandang Yuridis dan Sosiologis	24
C. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga.....	26
D. Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga	32
E. Kajian Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber data	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
BAB IV PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004	
DI KECAMATAN MANGGALA.....	47
A. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	
Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu	
Rumah Tangga	47
B. Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian UU PKDRT	
Terhadap Pembantu Rumah Tangga	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai salah satu instrument untuk mencapai cita-cita negara. Yang di mana negara menurut Soeknarko dalam buku “*Susunan Negara Kita, Jilid I*” Disebut: “Negara itu adalah oraganisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorial tertentu, yang di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai “*Souverein*”¹.

Rumah tangga merupakan salah satu organisasi terkecil yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Yang biasanya terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang syah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.

Dalam keluarga yang diidamkan adalah hubungan yang harmonis, menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing begitupun pekerja rumah tangga sehingga tidak terjadinya tindakan yang sewenang-wenang. Maraknya insiden kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sekali lagi membuktikan negara perlu turun tangan untuk melindungi kelompok ini. Selama ini perlindungan terhadap pekerja rumah tangga nyaris minim, karena dianggap sektor informal sehingga tak tersentuh regulasi.

¹ A. Ubaedillah dan Abdul Razak. *Pancasila, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah 2010), h. 14

Rumah tangga yang seharusnya di jadikan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga yang menjadi tempat penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²

Pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan mejadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. Alasan klasik yang seringkali digunakan ketika seseorang memutuskan akan mempekerjakan pekerja rumah tangga adalah sibuknya pasangan suami isteri, kesepian, kekurangan keterampilan rumah tangga, khususnya memasak, rasa malas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain.

Peran pekerja rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga sangatlah penting bagi bebepara orang. Perkembangan ruang lingkup pekerjaan, bagi buruh, yang bekerja di rumah, sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata ruang lingkupnya semakin luas dan kompleks, pekerjaan bukan hanya mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan kerumah tanggaan saja, akan tetapi biasa mencakup perihal penanganan atas

² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2009), h. 1.

perangkat berteknologi muktahir yang serba canggih. Misalnya saja dalam menangani dan bertanggung jawab atas alat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Terutama karena dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pekerja rumah tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya. Dari mulai memasak, mencuci, merawat kebun, keahlian mengendarai kendaraan bermotor untuk keperluan antar-jemput anak, merawat anak dan orangtua, bahkan mendampingi anak majikan ketika waktunya belajar.

Secara sosial, pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah profesi, sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan. Akronim pekerja rumah tangga pun lebih dipahami sebagai “Pembantu” dari pada “Pekerja” Rumah Tangga. Secara normatif, pekerja rumah tangga pun belum dianggap sebagai sebuah profesi, karena aktivitas pekerja rumah tangga dianggap jauh dari aktifitas produksi. Menjelaskan relasi pekerja rumah tangga dan pengguna jasa pekerja rumah tangga (majikan) memang tidak semudah menjelaskan relasi tenaga kerja dan pemberi tenaga kerja sebagaimana dalam hubungan industrial pada umumnya. Hal ini dikarenakan relasi pekerja rumah tangga dan pengguna jasa pekerja rumah tangga memiliki kekhususan yang unik dan kompleks.

Relasi antara pekerja rumah tangga dan pengguna jasa banyak dikondisikan dalam relasi kekeluargaan, yang dalam banyak hal dapat mengaburkan adanya relasi hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pengguna jasa. Akibatnya beban

pekerjaan dan hak-hak pekerja rumah tangga menjadi tidak terukur, jam kerja tanpa batas, gaji sangat rendah dan tidak adanya jaminan kesehatan.

Pekerja Rumah Tangga bekerja dan hidup tertutup dari pandangan publik karena sebagian besar dari mereka tinggal di rumah tempat dia bekerja. Tidak ada batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, membuat profesi Pekerja Rumah Tangga menjadi pekerjaan yang rumit, menuntut curahan waktu, perhatian, energi dan berbagai keterampilan. Namun seiring perkembangan jumlah Pekerja Rumah Tangga yang melonjak, nyaris tidak ada regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Rumah Tangga. Hanya undang undang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara eksplisit menyebut Pekerja Rumah Tangga sebagai obyek perlindungan dalam undang-undang tersebut. Selebihnya, Pekerja Rumah Tangga sama sekali tidak mendapat perhatian, pengaturan dan perlindungan secara hukum. Bahkan, undang-undang ketenagakerjaan pun sama sekali tidak menyinggung persoalan Pekerja Rumah Tangga ini.

Bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap pekerja rumah tangga masih kurang terlihat, apalagi jika dilihat dari banyaknya kasus kekerasan majikan kepada pekerja rumah tangga yang marak terjadi, dan kasus lain yang juga berhubungan dengan tidak dipenuhinya hak atas pekerja rumah tangga tersebut. Karena pekerja rumah tangga banyak yang tinggal di dalam rumah yang sama dengan majikannya, maka masalah jam kerja kerap tidak diperhitungkan, ditambah lagi dengan upah yang jumlahnya dapat dikatakan nominalnya sedikit, yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya. Padahal jika dilihat dari namanya,

yaitu pekerja rumah tangga, maka arti kata pekerja menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³

Sebelum terjadi perikatan hukum antara majikan dengan pekerja rumah tangga, ada baiknya hendaknya dibuat sebuah perjanjian kerja, yang bentuknya bisa berupa lisan, namun lebih baik lagi jika ada bentuk tertulisnya, yang dapat menjadi alat bukti jika suatu saat diperlukan. Dalam perjanjian kerja ini, ditulis secara lengkap dan rinci mengenai *job description* dari pekerja rumah tangga, upah yang diterima pekerja, fasilitas untuk pekerja, hak dan kewajiban dari majikan maupun dari pekerja, penentuan hari libur dan cuti, berapa lama waktu pekerja tersebut bekerja di rumah tersebut, dan hal-hal lain yang jika dianggap penting dapat dituliskan dalam perjanjian kerja tersebut, hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 (ayat 2) yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 28 D ayat (2) yaitu: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dengan adanya perjanjian kerja ini, diharapkan antara majikan dan pekerja dapat saling memahami keinginan satu sama lain dan juga menghindari perjanjian kerja yang sudah-sudah, bahwa perjanjian kerja tersebut hanya sepihak saja (isinya banyak merugikan pihak pekerja). Dan yang terpenting bahwa masing-masing pihak

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39

menyadari bahwa pekerjaan seperti pekerja rumah tangga pun harus dibatasi jam kerjanya, bukannya 24 (dua puluh empat) jam sehari selama tujuh hari seminggu.

Saat ini perlindungan hukum terhadap para pekerja rumah tangga nyaris nol. Tak ada regulasi yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mencakup pekerja rumah tangga sebagai kelompok pekerja yang harus mendapat perlindungan. Sudah sejak 2010 usulan Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga selalu tertolak untuk masuk prioritas Program Legislasi Nasional. Akibatnya, tak ada aturan tentang berapa gaji minimal, berapa lama jam kerja maksimal, kapan hari liburinya, dan tiada perlindungan yang memadai. Dengan maraknya insiden kekerasan terhadap pembantu, kebutuhan agar pemerintah meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Dunia (ILO) Nomor 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak pekerja rumah tangga serta mengesahkan RUU Perlindungan pekerja rumah tangga sudah semakin mendesak.⁴

Namun terlepas dari pekerja rumah tangga yang menjadi korban, tidak menutup kemungkinan penyiksaan yang dilakukan oleh majikan disebabkan karena kesalahan dari pekerja rumah tangga itu sendiri. Apalagi pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat yang di mana pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga sebagian besar masyarakat memilih untuk menjadi pekerja rumah tangga.

⁴ Konvensi Organisasi Buruh Dunia (ILO) Nomor 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak pekerja rumah tangga.

Oleh karena hal tersebut maka penulis berinisiatif untuk mengkaji lebih dalam mengenai pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan, sekaligus mencari tahu sejauh mana peran Undang-Undang PKDRT dalam melindungi hak-hak korban. Yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul : “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga”.(Studi Kasus di Kecamatan Manggala).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Korban dan Hak Haknya. Mengenai gambaran fokus penelitian yang hendak diteliti oleh penulis yang pertama adalah Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga, selanjutnya fokus penelitian kedua adalah faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kecamatan Manggala.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah PengImplementasian Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT terhadap pembantu rumah tangga (Studi kasus di kec. Manggala) selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga.
2. Apa saja faktor penghambat yang ditemui dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kecamatan Manggala.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

1. Rika Saraswati dalam bukunya *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, yang menjelaskan tentang pergeseran kasus kekerasan dalam rumah tangga dari hukum perdata ke hukum publik serta menambahkan putusan pengadilan dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan untuk menunjukan perihal jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, penyebab dan pertimbangan hukum dan pada akhirnya putusan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
2. Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H. dalam bukunya *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis*, menjelaskan bahwa kekerasan dalam

rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirisaukan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).

3. Muhammad Mustofa dalam bukunya *kriminologi*, membahas terkait metodologi penelitian kriminologi yang mendominasi kelemahan dan kelebihan statistik kriminal yang merupakan data utama analisis kriminalitas. Disertai pula dengan berbagai tema objek penelitian kriminologi yang dilengkapi dengan berbagai contoh penelitian terbaik yaitu survei korban kejahatan, survei pengakuan diri, pengukuran residivisme, penelitian eksperimental, studi peramalan, dan penelitian kualitatif yang meliputi penelitian kasus individual, kasus berganda, sub-kebudayaan maupun tingkah laku kolektif.
4. Rifka annisa dalam bukunya *perempuan mencari keadilan*. menjelaskan tentang gambaran untuk memahami jenis kekerasan yang ada dilingkungan. Baik membahas kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap Istri, kekerasan dalam pacaran, perkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan perempuan dan anak. Serta membahas tentang kiat-kiat dalam mencegah kekerasan yang terjadi pada lingkungan kita.
5. Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul *analisis gender dan transformasi social*, menguraikan tentang pengertian gender dan kaitannya dengan berbagai konsep tentang perubahan sosial, tetap menemukan konteksnya sampai sekarang.

Hal ini terjadi karena menyentuh pandangan-pandangan dasar dari gerakan perempuan, dan masih banyaknya praktik penindasan terhadap kaum perempuan sampai saat ini. Serta membahas tentang analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan, agenda mendesak gerakan feminisme, dan strateginya pada masa mendatang.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kecamatan Manggala.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang ditemui dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDT Terhadap Pembantu Rumah Tangga di kecamatan Manggala.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan untuk memperdalam kajian tentang pelaksanaan berlakunya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga sebagai perlindungan terhadap pembantu korban kekerasan rumah tangga.

- b. Dapat menambah pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan memberikan masukan kepada masyarakat demi menjaga dan melindungi hak pembantu rumah tangga dalam kekerasan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. kata *violence*, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa inggris berarti sebagai suatu serangan atau invansi, baik fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh *Elizabeth Kandel Englander* bahwa “*in general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.*”¹

Maksud dari pernyataan diatas adalah Secara umum, kekerasan adalah perilaku agresif dengan maksud untuk menyebabkan luka (fisik atau psikologis). kata *intent* adalah pusat; luka fisik atau psikologis yang terjadi secara tidak sengaja, dengan tidak adanya niat, bukanlah kekerasan.

¹ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2009), h. 12.

a. Pengertian Kekerasan Menurut para ahli

1. Soerjono Soekanto, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.
2. Abdul Munir Mulkan, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.
3. Stuart dan Sundeen, perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

- b. Pengertian kekerasan secara yuridis dapat kita lihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: *“Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.”*²

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali,

² R. Soeilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Politeia Bogor), h. 98.

tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Kemudian dalam Pasal 285 KUHP kekerasan dinyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Dalam Pasal 289 KUH-Pidana kekerasan dinyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan “kekerasan” atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

1. Berikut akan dijelaskan, beberapa Pasal yang menyangkut tentang kekerasan dalam Pasal 335 KUHP dinyatakan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.
 - b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Dalam hal bagaimana dirumuskan dalam butir 2 kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Kemudian pengertian kekerasan menurut hukum pidana tertuang juga di dalam Pasal 351 KUHP, Pasal ini hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelas dalam Pasal 351 KUHP kata “penganiayaan” tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata “mengambil” dari pencurian. Maka dapat dikatakan, inipun nampak ada rumusan secara material tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.

Pada dasarnya Rumusan Pasal 351 KUHP, Penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Perbedaan penggolongan penganiayaan seperti di atas, pada akibat dari penganiayaan, walaupun pada bentuk ke-4 merupakan perluasan arti dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dalam hal ini merupakan bentuk pokok, Menurut Adami Chazawi bentuk pokok artinya bahwa pada Pasal 351 KUHP memuat semua unsur dari tindak pidana

Penganiayaan, berbeda dengan bentuk lain seperti Pasal 352 dan 353 KUH-Pidana, hal ini hanya penjabaran dari bentuk pokok tersebut. Sehingga penganiayaan dapat dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 351 KUHP adalah:

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Dalam penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, kesengajaan pelaku tidak ditujukan pada akibat luka berat, sebab apabila ditujukan kepada luka berat tidak lagi menjadi penganiayaan biasa melainkan penganiayaan berat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pasal 354 ayat (1) KUHP. Sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Menurut Kansil:35 Kesengajaan itu harus memenuhi 3 (Tiga) unsur tindak pidana yaitu: Perbuatan yang dilarang, Akibat yang menjadi pokok, alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka jelas bahwa penganiayaan ini merupakan tindak pidana materiil yang artinya akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan, untuk dipandang telah terjadi penganiayaan secara sempurna, sepenuhnya pada apakah yang dituju telah terjadi ataukah tindak pidana penganiayaan itu. Tindak pidana penganiayaan ini memiliki beberapa pasal yang merinci dari penganiayaan biasa, ringan, berat, maupun sampai yang mengakibatkan kematian yang kesemuanya itu memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda.

Ketentuan ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar perkara pidana dipengadilan.

Sehubungan dengan hal itu pengertian kekerasan terutama yang terjadi di dalam rumah tangga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan yang termasuk ancaman, pemaksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area public maupun domestic.³

Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dimana pada tanggal 22 september 2004, presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Sesuai dengan Bentuk-bentuk tindakan kekerasan

³ Rifka annisa, *perempuan mencari keadilan* (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2007), h.1.

dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu: ⁴

- a. Kekerasan fisik Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjiakan, penginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.⁵
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. Bahkan, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

⁴Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. h. 19.

⁵Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis), (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), h. 85.

Hak-hak reproduksi perempuan, misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.

- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual disebut juga sebagai pelecehan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat berupa siulan nakal, kedipan mata, gurauan dan olok-olok yang menjurus pada seks, memandangi tubuh mulai ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberikan bahasa isyarat yang berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, serta meraba atau mencubit.⁶

(Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Hal ini meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

⁶ Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, *Gender dan Inferioritas perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 204.

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selain itu, pemaksaan hubungan seksual merupakan bentuk ketidakadilan gender berjenis *Gender* dan *Violence* (Kekerasan). Ketidakadilan gender jenis ini terjadi disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya: pemerkosaan terhadap perempuan dalam perkawinan, perkosaan terjadi ketika suami melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan si istri, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam bentuk pelacuran.⁷

- d. Penelantaran rumah tangga dapat juga dimasukkan dalam penegertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupannya, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantara tersebut juga berlaku pada setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah,

⁷ Fakhri Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 12.

sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Hal ini meliputi:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat sub jektif.

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa UU PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHPidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.

3. Hak-Hak Korban

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut : Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (by act) maupun karena kelalaian (by omission) ⁸

Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Seperti ketika kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga kita berhak mendapatkan hakseperti yang di jalaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kopolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya, atau pihak lainnya, baik

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: 2011), h. 9.

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hokum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Perlindungan korban dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang). Perlindungan korban dapat pula diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social.⁹

⁹ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 61.

B. Kejahatan Dari Sudut Pandang Yuridis dan Sosiologi

Kejahatan tersebut terbagi:

1. Kejahatan dari sudut pandang yuridis

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum Pidana.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

2. Secara Sosiologis

Garofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Begitu juga Thomas menyatakan, bahwa kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok di mana pelaku menjadi anggotanya.

Kejahatan dalam perspektif ini diartikan sebagai pelaku (behavior), yakni studi tentang aktivasi yang melukiskan tentang pelanggaran standar social, apakah perbuatan dimaksud melanggar hukum pidana atau tidak. Dengan demikian, sepanjang perbuatan dimaksud dinyatakan atau dianggap pelanggaran terhadap standar, nilai-nilai, maupun norma-norma social pada umumnya adalah kejahatan.¹⁰

Kejahatan dipandang sebagai suatu label yang dilekatkan terhadap suatu perbuatan, dalam hal ini terminologi kejahatan yang bersifat teknis diganti dengan istilah yang bersifat umum, yakni perilaku menyimpang (*deviance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Howard Backer, bahwa perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap atau label tertentu terhadap perilaku tersebut.¹¹

Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.¹² Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), h. 16

¹¹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi, kajian sosiologi terhadap Kriminalitas, Pelaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Fisip UI Press, 2007), h. 25

¹² Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 15.

perilaku yang berbeda-beda, tetapi ada didalanya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama kaidah dalam masyarakat.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga

Sejumlah penelitian menemukan bahwa factor-faktor kualitas yang sangat signifikan terhadap timbulnya tindak kekerasan, baik yang terjadi pada korban yang masih berada dalam kategori anak maupun orang dewasa (laki-laki dan perempuan) dan bahkan juga para lanjut usia, adalah:

1. Faktor budaya dimasyarakat.

Di Indonesia, anak-anak dan perempuan masih belum mendapat tempat atau masih belum dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Ini disebabkan adanya faktor budaya di beberapa daerah yang masih menerapkan hal tersebut. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dapat dikatakan sebagai akibat dari sistem dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki banyak sekali ragam kebudayaan, karena dari sisi historis Indonesia adalah kumpulan dari berbagai kerajaan dan suku bangsa yang disatukan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Di Indonesia kata “melindungi”, ”mendidik” mempunyai banyak persepsi yang berbeda-beda. Kata-kata tersebut sering disalahartikan dengan mengekang kebebasan, mengurung, memukuli, dan perlakuan buruk lainnya dengan alasan melindungi dari pengaruh buruk

lingkungan. Padahal, pada intinya orang tua hanya menginginkan anak-anak menjadi seperti yang orang tua inginkan.¹³

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: *Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :*Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.*

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang tersubordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah

¹³ <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentiearticle/view/6592>. diakses pada 13 april 2019.

yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.¹⁴

Kesetaraan gender belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak.

Latar budaya patriarki dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: "*Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.*"

¹⁴ Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, pada situs <http://www.uninus.ac.id>, diakses pada 29 April 2018.

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis. Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

2. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri.

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai isteri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh istrinya, malah isteri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami isteri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum *keperdataan*. Isteri yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum.

Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si isteri yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim biasanya menyelesaikan dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT seperti halnya hukum publik (hukum pidana). Karena sanksi tersebut tidak ada maka tidak ada efek jera bagi suami sebagai pelaku kekerasan, sehingga kekerasan tersebut tetap saja terjadi untuk seterusnya.

3. Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. *Jadi visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan *saksi*, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di

ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Kendala lain adalah bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam UU PKDRT. Antara lain penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda antara penegak hukum maupun masyarakat sendiri. Seperti contoh kasus yang dialami oleh Ny. M. Putusan hukuman yang hanya 2 bulan dikarenakan hakim menafsirkan bahwa KDRT fisik yang dilakukan oleh suami hanya diakomodir pada pasal 44 ayat 4 saja, serta luka yang dialami korban adalah luka ringan yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dan tidak mendapatkan perawatan yang intensif (*opname*). Padahal, berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit, korban mengalami patah tulang serta kehilangan indra penciumannya. Hal ini juga dikuatkan saksi ahli dimana memberitahukan bahwa luka tersebut harus dievaluasi lagi satu tahun kemudian, jika tidak pulih indra penciumannya, berarti korban mengalami cacat permanent. Hal inilah yang menjadi kendala bagi korban untuk menggapai keadilan. Selain itu, masalah pembuktian maupun belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan maupun penanganan masih menjadi penghambat bagi korban maupun penegak hukum.

4. Masalah gangguan dan keretakan dalam hubungan social yang dialami keluarga dan komunitasnya

5. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang diakibatkan oleh masalah psikososial, seperti kualitas hidup yang disharmoni dan gangguan mental yang dialami oleh pelaku
6. Lemahnya control social primer dalam masyarakat, seperti lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga membuka bagi timbulnya perilaku kekerasan yang tidak terkendali serta mendorong semakin meluasnya potensi unsur-unsur dalam keluarga dan komunitas tertentu, untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara sendiri,
7. Pengaruh nilai budaya yang berlaku di lingkungan social tertentu, baik yang berkaitan dengan perilaku kekerasan itu sendiri maupun keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan karena dianggap sebagai wilayah domestic keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain ¹⁵

D. Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga

Negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang tertuang dalam salah satu sila alam Pancasila, yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Disebutkan manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya. Hak dan kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Departemen Sosial RI, *Standar Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan* (Jakarta: Perpustakaan Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja migrant, 2003).

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang: 2010), h. 49.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan arti pekerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan menyebutkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian, meskipun secara gramatikal Pembantu Rumah Tangga dipisahkan pengertiannya dari istilah pekerja pada umumnya, tetapi dikategorikan sebagai bagian maksud pengertian pekerja tersebut. Karenanya hak-hak pekerja rumah tangga sejatinya adalah juga hak-hak yang diperoleh pekerja sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bermuara pada hak-hak konstitusional pekerja yang diatur Undang Undang Dasar Tahun 1945, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak pekerja rumah tangga dapat dikategorikan sebagai perlawanan terhadap konstitusi.

Secara *exvressi verbis* (tersurat), Undang Undang Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2), demikian pula pasal 28D ayat (2) mengakui hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layal dalam hubungan kerja, bahkan pasa; 28H ayat (1) menggariskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, lebih dari itu, para pendiri Negara mengkontruksikan tujuan berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan

memajukan kesejahteraan umum yang didasarkan atas keadilan social. Guna mewujudkan kahendak tersebut, pasal 281 ayat (5) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan perinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 281 tersebut Undang-Undang HAM, yang secara spesifik dalam bagian ketujuh tentang hak atas kesejahteraan, khususnya pasal 38 memberikan pengakuan dan pengaturan bahwa:

1. Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upa serta syarat syarat perjanjian kerja sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pada 16 juni 2011, sesi ke 100 sidang ILO dengan tema “kerja layak” mengadopsi konvensi ILO No. 189 Mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, yang didalam konvensi tersebut diatur antara lain:

- a. Pengakuan PRT sebagai pekerja yang mempunyai hak harus dilindungi dan dihormati selama bekerja
- b. Standar perlakuan yang bertujuan untuk melindungi PRT. Di antaranya perlindungan berdasar prinsip hak asasi manusia, diantaranya penghapusan diskriminasi bagi perempuan, perlindungan anak, perwujudan hak sipil politik ekonomi, social dan budaya, perlindungan dari pelanggaran hak dan kesewenangan, penghapusan kerja paksa dan hak lainnya seperti jam kerja, waktu libur, waktu istirahat, jaminan social, pendidikan dan pelatihan, dan lain lain.

E. Pandangan Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah. Perkawinan tanpa akta nikah dapat terjadi karena berbagai sebab salah satunya menghindari persyaratan berpoligami dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya, menurut hukum islam dan Kompilasi hukum Islam (KHI) suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (dibawah tangan) dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan tanpa akta nikah berakibat hukum pada Istri dan anak mengenai hak-hak istri, kewarisan, dan pengakuan anak. Untuk menghindari hal

tersebut, mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan *Istbat Nikah* Ke Pengadilan Agama.¹⁷

Setiap orang didunia ini, tidak menginginkan menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun dan karna apapun. Tetapi realitas social yang penuh dengan ragam kepentingan terkadang, dengan kesadaran atau tanpa kesadaran, memaksa orang untuk berbuat timpang dan menindas orang lain. kekerasan-kekerasan pun terjadi dan masih terus akan menjadi selama konflik kepentingan itu masih ada dalam kehidupan ini. Semangat untuk mencari dan mewujudkan keadilan menjadi penting untuk terus digulirkan dalam rangka menghapuskan ketimpangan kehidupan, menghentikan kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban.¹⁸

Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan islam dalam membangun rumah tangga adalah mawadda warahmah (kasih dan sayang).

Dalam konteks rumah tangga, bentuk- bentuk kekerasan memang biasanya terjadi baik yang menimpa istri, anak-anak, asisten rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misalnya suami memukul istri. Ibu yang memukul anaknya karna tidak menuruti perintah, atau asisten rumah tangga yang disiksa majikan karna tidak

¹⁷ <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v2i2.4002> diakses pada 7 juli 2019. Pukul 01:15 wita.

¹⁸ <https://www.kumpulanmakalah.com/2016/11/kekerasan-rumah-tangga-dalam-perspektif.html> diakses pada 10 september 2018, pukul 23:10 wita.

beres mengurus pekerjaan rumah. Semua kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada dasarnya harus dikenai sanksi karna merupakan kasus kriminalitas.¹⁹

Perlu digaris bawahi bahwa konteks rumah tangga, suami memiliki keharusan untuk mendidik istri dan anak-anaknya supaya taat di jalan Allah swt. Sesuai dengan firman Allah swt dalam (QS- at-Tahrim :66:6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

“hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” yaitu kamu perintahkan dirimu dan keluargamu yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat pembantu perempuan, pembantu laki-laki untuk taat kepada Allah swt. Dan kamu larang dirimu beserta semua orang yang berada dibawah tanggung jawabmu untuk tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah, kamu perintahkan mereka untuk melaksanakannya dan kamu bantu mereka untuk menyelesaikannya. Bila kamu melihat ada orang yang berbuat maksiat maka kamu

¹⁹ <http://kamilia-milestones.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-terhadap-kekerasan.html>. Diakses pada 12 september 2018, pukul 22: 33 wita.

cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mengajarkan kepada orang yang berada dibawah tanggung jawab segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah swt kepada mereka.

Makna ayat diatas sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud bahwa Rasulullah Saw Besabda:

“perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat bila telah mencapai usia tujuh tahun. Bila telah mencapai sepuluh tahun, pukulalah mereka bila tidak mau mengerjakannya.”

Para ahli fiqh mengatakan, demikian pula halnya dengan puasa, agar anak-anak terlatih dalam melakukan peribadatan sehingga di kala dewasa nanti mereka akan tetap menjalani hidup dengan ibadah dan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan kemunkaran.

“Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (al-hijarah) dalam ayat ini ada yang mengatakan sebagai patung-patung yang mereka sembah. Ibnu mas’ud mengatakan, “batu belereng” mujahid mengatakan batu yang baunya lebih busuk dari pada bangkai”. “penjaganya malaikat-malaikat yang kasar”. Yaitu yang tabiatnya kasar. Allah telah mencabut dari hati-hati mereka rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir . “dan keras” yaitu susunan tubuh mereka sangat keras, tebal dan penampilannya yang mengerikan. Wajah-wajah mereka hitam dan taring-taring mereka menakutkan. Tidak tersimpan dalam hati mereka masing-masing rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir, walaupun sebesar dzarrah.”

Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” Yaitu mereka tidak pernah

menanggukhan bila datang perintah dari Allah walaupun sekejap mata, padahal mereka bias saja melakukan hal itu dan mereka tidak mengenal lelah. Merekai itu malikat zabaniah. Kita berlindung kepada Allah dari mereka.

Namun di sisi lain, selain keharusan taat pada suami, perempuan boleh menuntut hak-haknya laksana nafkah, kasih sayang, perlakuan yang baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



‘Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kehidupan kehidupan berrumah tangga ialah dalam konteks mendirikan syariat Islam, mengarah ke ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan berkolaborasi dalam membina rumah tangga yang harmonis mengarah ke derajat takwa. Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka mengajak (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, membayar zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah [9]: 71).

Berhubungan dengan itu diperlukan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak dapat disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, laksana dilayani istri dengan baik. Sebaliknya pun suami memiliki keharusan untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang pantas dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisâ' [4]: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bias jadi

kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 19).

Allah sangat menghargai wanita dan menjaga hak-hak mereka dengan baik. Salah satu buktinya adalah Allah menghapuskan teradisi jahiliyah yang dilakukan orang-orang arab. Tradisi tersebut adalah menjadikan wanita seperti barang yang dapat diwariskan apabila suaminya meninggal. Anak suami (bukan dari wanita yang dicerai) atau kerabatnya mempunyai hal penuh atas wanita yang ditinggal mati.

Dalam ayat ini Allah swt ingin mengingatkan dengan perintahnya kepada laki-laki supaya mereka bergaul dengan pasangan mereka dengan baik. Tidak semena-mena. Sebenci apapun harus tetap baik kepada mereka. Sebab bias saja lelaki membenci istrinya padahal banyak kebaikan yang ada pada istrinya tersebut. Ayat ini meski berkaitan dengan suami istri, tetapi juga berlaku dalam berbagai aspek dalam bergaul kepada orang lain. Bila kita membenci sesuatu, maka jangan lupa bahwa bias saja Allah menjadikan banyak kebaikan dalam apa yang kita benci. Sehingga disini kita diingatkan untuk selalu obyektif dan tidak berlebihan dalam membenci sesuatu atau seseorang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan atau *field research* kualitatif. Penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah)¹. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara factual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.² Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.³ Yang dimana penelitian ini menitik beratkan

¹LexyJ.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdayaKarya, 1995), h. 15.

²LexyJ.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.11

³Lihat Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14.

pada hasil pengumpulan data informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar yaitu di Kecamatan Manggala. Alasan Penulis mengambil tempat penelitian di Kecamatan Manggala disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini adalah normative-empiris yaitu penelitian yang mengkaji korelasi antara efektifitas peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang berlaku yang dikaitkan dengan kekerasan yang terjadi terhadap pembantu rumah tangga.

C. Sumber Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan pihak terkait korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literature atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku,

surat kabar, majalah, Koran dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data. Dengan demikian, maka suatu pedoman untuk mengumpulkan data dan mengolahnya.⁴

1. Penelitian pustaka (*liberary research*).

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan.

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu: Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.

Wawancara (*interview*) langsung kepada pembantu rumah tangga korban yang terkena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, dan RKM Batua yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, selaku korban tindak KDRT serta sumber lainnya yang dianggap memiliki kompetensi.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 1986), h .164

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan sistim populasi dan sampel sebagai berikut:

a. Pengertian Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itulah definisi populasi dalam penelitian.

Populasi disini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk khidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Bahkan satu orang pun bias digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya.

b. Pengertian Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu, yang digunakan untuk mengumpulkan informasi/data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi.

Dari definisi tersebut jelas bahwa sampel yang penulis ambil digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi, atau dengan kata lain, sampel digunakan untuk menggeneralisasi suatu populasi. Dengan demikian, sampel harus betul-betul bersifat representative sehingga dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik populasi darimana sampel itu diambil.

Sampel yang penulis ambil dari 4 kelurahan yang ada di kecamatan Maggala yaitu hanya empat saja yang mewakili berdasarkan sumber data dari Rumah Konseling Dan Mediasi (RKM) Batua dan Observasi langsung ke lapangan,

BAB IV

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PKDRT DI
KECAMATAN MANGGALA**

***A. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga.***

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.¹

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus. Sebelum melihat aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan.

Dalam tindak pidana kekerasan terhadap pembantu rumah tangga ternyata ada beberapa orang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh majikannya sendiri, dari hasil penelitian yang penulis lakukan setelah turun

¹ Secretariat jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: MPR RI, 2015), h. 116

kelapangan dengan menggunakan metode wawancara saya menemukan beberapa orang atau korban dari tindak pidana kekerasan terhadap pemabantu rumah tangga, berikut yang menjadi hasil wawancara dari beberapa korban yang berada di Kecamatan Manggala. Dari beberapa hasil penelitian terhadap beberapa korban, ternyata tidak semua korban melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib dan beberapa yang saya temukan dari hasil penelitian, yang saya temukan di Kecamatan Manggala kota Makassar diantaranya Data jumlah korban, Data umur korban, Data tingkat pendidikan korban, sebagai berikut penjelasannya, yaitu :

1. Data Jumlah Korban

Dari hasil penelitian penulis di Kecamatan Manggala, jumlah kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi dalam kurung waktu setahun, terdapat 5 (lima) jumlah korban, 2 (dua) di antaranya masih ber umur belasan tahun. Selanjutnya, penulis akan sajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Pembantu Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 3 (tiga) Kelurahan di Kota Makassar Tahun 2017 :

NO	KELURAHAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Batua	2	40%
2.	Borong	1	10%
4.	Antang	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: Rumah Konseling dan Mediasi (RKM) Batua.

Tabel 2. Data Jumlah Pembantu Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 1 (satu) Kelurahan di Kota Makassar Tahun 2018 :

No	KELURAHAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Manggala	2	100%
Jumlah		2	100%

Sumber: Wawancara langsung dikelurahan Manggala.

Tabel ke 1 di atas menunjukan bahwa jumlah korban Pembantu Rumah Tangga dalam rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik, sikis, ekonomi dan penelantaran di 3 (tiga) Kelurahan. Yaitu pada kelurahan Batua sebanyak 2 (dua) korban kekerasan dalam rumah tangga atau 40 % kelurahan Borong sebanyak 1 (satu) atau 20 % selanjutnya pada kelurahan Antang sebanyak 2 (satu) atau 40% korban kekerasan dalam rumah tangga dan dari 3 (tiga) kelurahan yang dimaksud merupakan kekerasan dalam bentuk psikis, fisik, ekonomi dan penelantaran.

Table ke 2 diatas menunjukkan bahwa jumlah jumlah korban Pembantu Rumah Tangga dalam rumah yang menjadi korban kekerasan Sikis dan ekonomi di satu kelurahan yaitu kelurahan manggala 2 (dua korban kekrasan dalam rumah tangga atau 100% .

Beberapa di antaranya memilih untuk diam dikarenakan trauma psikis dan takut melapor. Dari 7 informasi yang saya temukan tidak ada yang melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib karna menganggap bahwa kekerasan yang mereka alami bukanlah kekerasan serius dan dua korban lainnya adalah anak yang masih

tergolong muda. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan mental, pendidikan, dan umur dari masing-masing korban.

2. Data Umur Korban

Berdasarkan hasil dari penelitian yang Penulis lakukan di 4 (kelurahan) dapat diketahui bahwa pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berkisaran umur 18 sampai 45 tahun ke atas. Berikut ini Penulis gambarkan dalam bentuk tabel kisaran umur para korban kejahatan kekerasan psikis:

Tabel 3. Data Umur Pembantu Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Manggala.

Umur Korban	Jumlah	Presentase
18 Tahun	1	14,3%
19 Tahun	1	14,3%
21- 25 Tahun ke atas.	3	42,9%
30 - 45	2	28,6 %
Jumlah	7	100 %

Tabel di atas menunjukan bahwa pekerja rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak menjadi korban kejahatan kekerasan di Kecamatan Manggala, yaitu korban yang berumur antara kisaran 18 Tahun sampai 25 tahun ada 5 orang. 35 sampai 45 dua orang. Umur yang masih muda menyebabkan perempuan (pekerja rumah tangga) sebagai korban tersebut rentan untuk menjadi

korban kekerasan (kurang pengetahuan, mental yang lemah dan sebagainya). Rincian dari tabel di atas yaitu jumlah korban yang berumur 18 tahun, yaitu berjumlah 1 orang atau (14,3%), untuk usia 19 tahun berjumlah 1 orang atau (14,3%), untuk kisaran usia 21 sampai 25 tahun ke atas berjumlah 3 orang atau (42,9%) dan umur 35 sampai 45 tahun berjumlah 2 orang atau (28,6%) Dari tabel diatas penulis simpulkan semakin bertambahnya usia seseorang dalam bekerja, maka semakin rentan untuk mengalami tindak kekerasan.

3. Data Tingkat Pendidikan Korban

Fenomena kejahatan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, juga berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan korban, dan peranan tingkat pendidikan tersebut dihubungkan dengan kejahatan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang terjadi di wilayah Kecamatan Manggala, dan untuk lebih spesifiknya penulis gambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Data Tingkat Pendidikan Perempuan (pembantu rumah tangga) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
Tidak Tamat SD	-	-
SD	4	67,1%
SMP	2	28,6%
SMA	1	14,3%
Jumlah	7	100 %

Dalam tabel di atas, tampak bahwa korban kekerasan terhadap pembantu rumah tangga di Kecamatan Manggala yang paling banyak adalah yang hanya sampai pada tingkat SD, SMP dan SMA. Dari jumlah korban total 7 (tujuh) korban, yaitu terdapat 4 atau (67,1%) orang hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 2 atau (28,6%) orang tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 atau (14,3%) Dari table diatas penulis dapat simpulkan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang sebagai pembantu rumah tangga semakin berdampak akan terkena kekerasan dalam rumah tangga karena faktor pendidikan yang masih rendah.

4. Wawancara Terhadap (pembantu rumah tangga) Korban KDRT

Dalam mencari data-data yang disebutkan di atas, Penulis melakukan wawancara langsung dengan perempuan (pembantu rumah tangga) korban kekerasan dalam rumah tangga terkait. Jumlah (pembantu rumah tangga) sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban kekerasan yang berhasil Penulis wawancarai berjumlah 5 (lima) orang.

Adapun wawancara penulis kepada (pembantu rumah tangga) korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a) Wawancara yang pertama dengan Ati di Kelurahan Antang selaku korban kekerasan dalam rumah tangga²:

Awal kejadian saat sore, Andi (majikan) pulang kerja dan pada saat itu anaknya menangis, usia anak tersebut 2 tahun, di saat yang bersamaan ibu (majikan) saya sedang mandi. jadi waktu itu kan saya sementara memasak

² Ati, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Wawancara, 7 Februari 2018)

juga didapur untuk persiapan makan malam dan Andi menyuruh saya untuk membujuk anaknya untuk berhenti menangis, saya pun bergegas menggendong anak tersebut lalu membujuknya agar bisa berhenti menangis, setelah saya gendong dan bujuk-bujuk anaknya, anak itu pun tidak kunjung berhenti menangis dan pada saat itulah ibu majikan saya keluar cepat-cepat dari kamar mandi dan mengambil anaknya dan memarahi suaminya yang tidak mau menggendong dan membujuk si anak untuk berhenti menangis mungkin karna si suami sedang capek pulang dari kantor, waktu itu si Ibu majikan saya mengambil anak tersebut dan memarahi saya juga, dia sempat mengatakan kalau saya pembantu yang tau mengurus anak lalu melemparkan saya handuk yang sudah dia pakai lap rambutnya. Berkali-kali saya mengalami tindakan kekerasan demikian kadang dimarahi dengan alasan sepele. Bias dibilang kalau saya juga termasuk orang baru di rumah ini belum cukup 4 bulan saya kerja di rumah majikan saya tapi sudah beberapa kali saya dimarahi dan diperlakukan seperti itu.

Dari hasil wawancara kepada Ati selaku korban kekerasan dalam rumah tangga penulis dapat simpulkan bahwa terjadinya kekerasan rumah tangga pada Ati diakibatkan permasalahan sepele, perselisihan antara suami dan si istri yang sering berujung pelampiasan kepada si Ati (pembantu rumah tangga).

- b) Wawancara yang kedua dengan Anti di Kelurahan Batua selaku korban kekerasan dalam rumah tangga:³

Pada 8 (Delapan) bulan terakhir ini bapak (majikan) saya tidak lagi memberikan gaji saya. alasan Bapak tidak memberikan gaji saya adalah karena saya diangkat beliau sejak umur 13 tahun, seingatku dulu saya sering dibelikan baju dan beberapa kebutuhan saya selama tinggal dan bekerja di rumah. Kata Bapak semua gaji saya telah diberikan kepada orang tua saya di kampung. Tapi kan saya juga ingin menjadi seperti anak-anak yang lain, yang ingin membeli sesuatu dari hasil gaji saya sendiri, seperti baju, sepatu dan kebutuhan lain. Setiap kali saya meminta uang gaji saya sm bapak (majikan) dia selalu beralasan kalau gajinya sudah dia transfer ke orang tuanya di kampung, saya selalu dimarahi dan dibentak kadang berakhir pemukulan oleh Bapak. Sudah sering saya diperlakukan seperti itu sama bapak, pernah saya dimarahi waktu sore pada saat banyak orang didepan rumah yang sedang bercerita didepan rumah, dikejadian sore ini lah ada tetangga yang tidak tega

³ Anti, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Wawancara, 7 Februari 2018)

melihat saya diperlakukan seperti itu lalu melaporkan kejadian ini kepada Nurlinda selaku dia yang ketua rumah konseling dan mediasi.

Dari hasil wawancara kepada Anti selaku korban kekerasan dalam rumah tangga penulis dapat simpulkan bahwa terjadinya kekerasan rumah tangga pada rumah tangga diakibatkan pelaku merasa tidak betah dengan permintaan dari Anti yang selalu menuntut perihal gajinya. Pelaku juga merasa telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan gaji Anti kepada orang tuanya di kampung. Hal tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan memberikan pemahaman kepada korban perihal uang yang belum boleh dia pegang dalam jumlah banyak. Ditakutkan uang tersebut disalahgunakan oleh korban.

c) Wawancara ke tiga bersama Eda di kelurahan Borong.

Berawal pada saat korban (Eda, 19) disuruh oleh majikannya (Dila, 31 tahun) saya disuruh oleh majikan saya menjaga anaknya yang sedang bermain. Setelah si anak selesai bermain, saya membujuk anaknya untuk tidur karna saya lihat dia dari tadi menguap sambil bermain jadi saya pun mengajaknya untuk tidur dan kami pun sama-sama tertidur. Dalam keadaan pulas saya tertidur mungkin karna pengaruh hujan juga, saya tidak tahu jika anak majikan saya bangun dan lari bermain di pekarangan rumah sambil hujan-hujan. Dan anak majikan saya pun terjatuh, kepalanya terbentur di lantai teras rumah, saya kemudian terbangun karna suara anak tersebut menangis karna terjatuh akibat lantai yang licin, kepalanya memerah dan bengkak. Tidak lama kemudian Ibu dan Bapak Majikan saya pulang kerja. Pertama dia melihat si anak tersebut kepalanya memerah dia bertanya dulu sebelumnya kenapa anaknya seperti ini, kemudian saya menceritakan kejadiannya, setelah saya selesai ceritakan dia langsung mendorong saya sampai terjatuh dan memaki maki saya dan hampir dipukul untung waktu itu suaminya ada disampingnya yang menahannya.⁴

d) Wawancara ke empat bersama ibu Erni di kelurahan manggala.

Ibu erni umur 45 tahun, saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 3rumah di daerah manggala saya digaji 10 ribu 1 hari saya itu masuk pagi

⁴ Wawancara pembantu rumah tangga di kelurahan borong 8 february 2018.

pulang sore, yang saya kerjakan itu mencuci, mengepel sama menyetrika di tiga rumah itu, perjanjian sebelumnya sama ibu majikan saya boleh pulang jika pekerjaan yang tiga itu sudah selesai tapi, setelah saya bekerja selama 2 bulan lebih dirumah majikan saya, ibu majikan saya sudah sering menyuruh saya untuk mencuci piring juga dan itu dilakukan berulang ulang kali dan sudah tidak sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Pernah juga dia melarang saya pulang waktu itu pekerjaanku sudah selesai dan saya sudah siap untuk kerumah selanjutnya tapi ibu majikan saya melarang saya pulang. Pernah juga saya nda digaji sama majikan ku karna dia beranggapan bahwa pekerjaan yang saya lakukan tidak terlalu berarti katanya.⁵

e. Wawancara yang kelima dengan mba Ross di kelurahan Manggala.

Pada waktu itu saya sudah minta ijin sama ibu majikan saya untuk pulang kerumah waktu hari minggu, saya meminta pulang karna sudah lama saya tidak pulang dan ibu majikan saya mengijinkan saya untuk pulang. Setelah saya sudah ditengah perjalanan pulang, ibu majikan saya menelfon saya untuk kembali kerumah untuk memasak persiapan makan malam dan menjaga anaknya karna ibu majikan saya mau keluar ketemu sama teman teman kerjanya. Dengan berat hati saya harus kembali lagi kerumah majikan saya. Sebenarnya waktu itu saya ingin menolak. Tapi karna saya takut diberhentikan dan kalau saya diberhentikan saya juga bingung mau kerja apa lagi. Jadi saya harus kembali lagi kerumah tempat saya bekerja. Dan ini bukan yang pertama kalinya majikan saya berbuat seperti ini ke saya ini yang kesekian kalinya dengan kasus yang sama. Masalah gaji juga yang saya keluahkan sama majikan saya dia suka telat bayar gaji saya. Memang dia tidak pernah bermain fisik tapi yang buat saya ngeluh kadang masalah gaji yang sering telat dibayar.⁶

Dari hasil wawancara dengan mba Ross selaku pekerja rumah tangga dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perlakuan sewenang-wenang seorang majikan ke pekerja rumah tangga tersebut karna tidak adanya perjanjian secara tertulis sebelumnya yang berisi tentang hak-haknya dan hari apa saja dia boleh libur.

⁵ Wawancara dengan ibu erni di kelurahan manggala, 9 November 2018

⁶ Wawancara dengan Mba Ross di kelurahan Manggala, 10 November 2018

5. Analisis Penulis

Berdasarkan dari data-data yang penulis temukan dilapangan yang dimana dalam pandangan penulis, Undang-Undang PKDRT belum efektif melindungi hak-hak pekerja rumah tangga secara utuh karna tidak adanya aturan yang mengatur tentang hak-hak seorang pekerja rumah tangga tersebut berapa jam dia harus bekerja dan hari hari apa saja boleh libur dan berapa standar gajinya. Karna tidak adanya aturan inilah yang membuat para pekerja rumah tangga tersebut rentan mengalami perlakuan sewenang-wenang dari si pemberi kerja seperti lambatnya mereka digaji, tidak adanya hari libur untuk mereka.

Kemudian Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 UU PKDRT yang memberikan definisi membingungkan. Dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Pada pasal yang telah dijelaskan diatas bahwa tidak adanya penjelasan yang diberikan terhadap Pasal 1 (1) ini karena dianggap cukup terkhusus terhadap perempuan.keadaan dan status korban, Tipologi korban dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut:⁷

1. *unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

⁷ Wade Darma, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 37.

2. *provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. *participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *biologically victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum lelaki ditempatkan pada posisi dominan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi yang sedemikian superior sering mengakibatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalah artikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi aktor pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian dalam rumah tangga, tidak hanya laki-laki menjadi pelaku utama kekerasan, perempuan juga terlibat didalam tindak pidana ini walau hanya dalam skala yang lebih kecil. Korban menurut Undang-undang ini adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 UU PKDRT yang menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam

rumah tangga, maka korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan. Hal ini dikuatkan oleh konsiderans menimbang huruf c yang menyatakan bahwa

“korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”

Dengan demikian, perlindungan dalam UU PKDRT menitikberatkan pada perlindungan korban berjenis kelamin perempuan sehingga sudah tepat jika undang-undang ini mengutamakan perempuan.

Kita tidak dapat pungkiri dalam beberapa kasus, suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tidak asing lagi di telinga kita tentang istilah ‘suami takut istri’. Dalam hal ini suami (lelaki) merasa terintimidasi terhadap segala macam tuntutan dalam rumah tangganya. Di satu sisi ketika suami bekerja dengan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangganya, sehingga suami tertekan secara psikis. Dalam kondisi tersebut, suami akan menjadi seseorang yang sangat mudah marah dan sulit mengendalikan emosinya sendiri.

Sementara itu, pengesanan bahwa undang-undang ini hanya melindungi kaum perempuan yang berstatus isteri seperti yang berkembang dewasa ini nampak kontradiktif dengan muatan UU ini sendiri. UU PKDRT menyatakan dalam Pasal 2 bahwa lingkup rumah tangga meliputi antaranya suami, isteri, dan anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan telah dianggap sebagai anggota keluarga juga dapat dianggap berada dalam lingkup rumah tangga. Nyatalah bahwa Undang-undang ini tidak saja terbatas untuk melindungi perempuan yang berstatus isteri saja, namun juga suami dan juga anak serta orang-orang lain yang mempunyai hubungan tertentu seperti pembantu rumah tangga.

Oleh karena itu kata-kata terutama perempuan dalam Pasal 1 (1) adalah juga meliputi perempuan yang bukan isteri, namun pula mereka yang termasuk dalam Pasal 2 yakni anak, maupun perempuan yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, dan persusuan maupun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jika Undang-undang mengutamakan (memprioritaskan) perempuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (1), bagaimana dengan anak laki-laki jika mendapat kekerasan dalam rumah tangga, Apakah mereka tidak hendak diutamakan oleh UU ini, Bagaimana mereka yang bekerja sebagai PRT, yang mengabdikan diri dalam rumah tangga dan kebetulan berjenis kelamin sebagai laki-laki dan mendapat perlakuan KDRT.

Mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga (siapa pun mereka yang ada dalam Pasal 2 UU ini) mempunyai kemungkinan menjadi pelaku maupun korban. Namun demikian mengapa UU ini terasa diskriminatif, dan hanya lebih menopang pada satu gender tertentu saja, Tak dapatkah sebenarnya UU ini dibuat yang lebih general, Pasal 3 UU ini secara tegas menyatakan bahwa PKDRT dilaksanakan dengan empat asas, yang dua di antaranya adalah asas keadilan dan kesetaraan gender serta

non diskriminasi. Dapatkah dikatakan bahwa UU ini menganut asas non diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender jika yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah satu gender saja yakni perempuan.

Ekses negatif penggunaan kata terutama perempuan adalah masyarakat dan aparat penegak hukum (*law enforcer*) akan lebih reaktif dan responsif terhadap kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Masyarakat akan tergiring pada persepsi dan imaji bahwa hanya laki-laki yang bisa berbuat kekerasan dan hanya perempuan yang berhak untuk selalu menyandang status sebagai korban. Oleh karena itu pemaksaan hubungan seksual akan tetap termitoskan dengan kekal sebagai hal yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan. Oleh karenanya pula, seorang perempuan adalah mustahil melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap laki-laki. Kesan bahwa UU ini hanya untuk kepentingan perempuan saja boleh jadi sekarang telah terbentuk, dan dapat mengakibatkan aparat yang melaksanakan UU ini menolak pengaduan seorang laki-laki tentang adanya KDRT, padahal UU ini memungkinkan hal demikian.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.

Dengan mengacu pada UU PKDRT, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat;

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang
3. Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada perempuan dan anak dikelompokkan dalam 5 kategori sebagai berikut:

1. Perlakuan salah (*abuse*) yang dapat mencederai secara fisik, mental psikis, dan seksual melalui pemukulan, pernyataan/ucapan, paksaan hubungan seksual dan sebagainya.

2. Tindak eksploitasi (*exploitation*) dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi, ekonomi dan kepuasan sendiri seperti perdagangan anak, pelacuran, pengemis dan sebagainya.
3. Penelantaran (*englected*) dilakukan dalam bentuk pengabaian (melalaikan) pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi dasar sehingga menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan yang tiada henti.
4. Perbedaan perlakuan (*discrimination*) dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang berbeda terhadap anak, isteri dengan orang tua dan sebagainya.
5. Pengabaian kondisi berbahaya (*emergency condition*) dengan membiarkan anak dan perempuan di wilayah konflik, di pengungsian, menggunakan zat kimia dan dalam keadaan bahaya lainnya.

Jika ditinjau dari bentuk kekerasan, UU PKDRT hanya mengakomodir tiga dari lima bentuk kekerasan yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Perbedaan perlakuan (*discrimination*) dan Pengabaian kondisi berbahaya (*emergency condition*) merupakan bentuk kekerasan yang tidak diakomodir dalam UU PKDRT sehingga UU PKDRT tidak melingkupi semua bentuk kekerasan yang mungkin terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi penting untuk diatur adalah perbedaan perlakuan (*discrimination*). Hal ini dikarenakan filosofi dari diundangkannya UU PKDRT adalah untuk menjamin bahwa setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, memiliki kesempatan dan hak yang sama serta

diperlakukan secara setara. Sekilas dengan tidak diaturnya bentuk Perbedaan perlakuan (*discrimination*) dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang berbeda terhadap anak, isteri dengan orang tua dan sebagainya dalam UU PKDRT membuat UU tersebut terlihat tidak melindungi perempuan.

Dalam Teori Sosial Konflik dijelaskan bahwa keluarga bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya.⁸

Pada hakikatnya, terdapat keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan

⁸ Megawangi Ratna, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), h. 71.

organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.

Sama seperti keluarga, setiap anggota keluarga memiliki fungsinya masing-masing. Keberagaman fungsi inilah yang pada akhirnya akan membuat keberagaman perlakuan. Dengan menyeragamkan perlakuan, maka secara otomatis akan menciptakan ketidakseimbangan karena perlakuan yang diberikan tidak sebanding dengan fungsi yang diemban. Oleh karena itu, dengan memasukkan nondiskriminasi dalam asas tanpa memasukkannya dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pilihan yang tepat.

Perbedaan perlakuan sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan *gender* telah melahirkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan tersebut terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan secara stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*).

Mengenai hak-hak korban dalam pasal 10 UU PKDRT:

Korban berhak mendapatkan:

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

(a) Compassion, respect and recognition; (b) Receive information and explanation about the progress of case; (c) Provide information; (d) Providing proper assistance; (e) Protection of privacy and physical safety; (f) Restitution and compensation; (g) To access to the mechanism of justice system.

Dari empat bentuk jaminan sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, Pasal 10 UU PKDRT telah memberikan jaminan terhadap hak-hak korban, kecuali pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial). Hal ini merupakan hal yang wajar, karena kebanyakan pasangan di Indonesia tidak melakukan perjanjian perkawinan sehingga terjadi pencampuran harta. Pemberian ganti rugi dari pelaku, yang notabene merupakan anggota keluarganya sendiri merupakan hal yang absurd ketika harta yang dimilikinya sejatinya adalah harta korban pula. Dengan kata lain, Pasal 10 UU PKDRT telah memberikan perlindungan kepada perempuan.

Sanksi Pidana Kekerasan Psikis (Pasal 45 UU PKDRT):

Pasal 45

- *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).*
- *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*

kelemahan substansial dalam UU PKDRT terkait dengan kekerasan psikis, yaitu (a) dampak psikis dibatasi pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, (b) dampak-dampak kekerasan psikis yang sudah dicantumkan itu hanya disebutkan namun tidak dijelaskan, dan (c) frase yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari juga tidak tepat untuk menjadi indikator keparahan dampak psikis.

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang melekat pada kekerasan fisik dan seksual. Seseorang dapat melakukan kekerasan psikis saja tanpa melakukan kekerasan fisik dan atau seksual. Namun kekerasan fisik dan atau seksual umumnya dibarengi dengan kekerasan psikis. Hal ini disebabkan kekerasan fisik dan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik, melainkan juga dampak psikis. Dampak psikis ini dapat saja berbeda-beda pada setiap orang. Dampak psikis juga tidak selalu muncul dalam bentuk gangguan jiwa yang kentara. Namun dampak ini dapat saja dirasakan korban sampai batas waktu yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu dibatasinya dampak psikis seperti pada butir (a) di atas dan menggolongkan

keparahan kekerasan psikis berdasarkan dampak yang menghambat kegiatan sehari-hari dengan sendirinya membatasi pengalaman perempuan yang kompleks dan subjektif. Dengan demikian menjadi penting untuk melibatkan unsur psikologis ini ketika mengevaluasi pengalaman korban KDRT dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi penanganan kasusnya.

Masalah paling signifikan adalah tidak semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, korban sering dipersalahkan sebagai pihak yang mencabut laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga memengaruhi korban dalam mencabut laporan.

Ada sebagian kasus yang justru dihentikan prosesnya oleh aparat kepolisian atau kejaksaan. Jika kasus diproses lebih lanjut pun, belum tentu korban mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman di bawah satu tahun yang tergolong ringan dibandingkan hukuman maksimal dalam UU PKDRT. Sementara itu dalam proses perceraian, UU PKDRT pun tidak pernah dijadikan pegangan oleh hakim karena fungsi UU PKDRT yang lebih terkait dengan hukum pidana. Tidak banyak korban yang dapat membicarakan KDRT yang dialaminya dalam sidang perceraian karena hakim menganggap hal itu bukan bagiannya. Tentunya amat disayangkan UU PKDRT yang bertujuan melindungi korban ternyata dalam pelaksanaannya sangat sedikit mencapai tujuan tersebut. Keberfungsian UU PKDRT untuk menegakkan keadilan bagi perempuan jadi

diragukan. Kekhawatiran pun muncul jikalau hukum memang tidak dapat menjadi alat bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ketentuan pidana dalam UU PKDRT tidak mencerminkan perlindungan terhadap perempuan.

Patut diingat, bahwa hukum dapat menimbulkan kultur baru dalam masyarakat, dan karena daya paksanya itu lambat laun akan diterima sebagai kebenaran. Sebagai alat untuk merekayasa, untuk membentuk perilaku masyarakat, hukum yang *in abstracto* (dalam manifestasinya sebagai produk perundang-undangan) maupun *in concreto* (putusan pengadilan) itu dapat membentuk perilaku masyarakat yang meskipun meskipun sadar hukum, namun tidak selalu insyaf keadilan. UU PKDRT bertujuan mulia, untuk menghapuskan praktik pelanggaran HAM dalam lingkup sosial terkecil yakni rumah tangga. Namun demikian dalam menggunakan pemahaman teori konflik, UU ini adalah produk politik juga di mana ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi, yang sayangnya bukannya membuat UU ini lebih luwes dan memenuhi rasa keadilan untuk semua, namun justru menciptakan kesukaran dan bahkan kekerasan baru yang sistemik dan berdaya paksa terhadap siapa saja mereka yang berkelamin laki-laki.

Dari hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga disebabkan kelalaian korban. Walaupun sebenarnya di satu sisi seorang ibu juga wajib memantau anaknya dan tidak diberikan sepenuhnya kepercayaan kepada pembantu rumah tangga untuk mengurus anaknya.

B. Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian Undang-Undang PKDRT Terhadap Pembantu Rumah Tangga.

Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, telah mengubah kekuasaan membentuk undang-undang, dari yang semula dipegang oleh presiden, beralih menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Penataan pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat ini, tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Langkah-langkah kearah pembentukan undang-undang yang lebih berkualitas, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendukung reformasi hukum, telah diimplementasikan melalui program legislasi nasional (prolegnas). Upaya perbaikan tersebut menyangkut proses pembentukannya (formil), maupun substansi yang diatur (materil). Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan, bahwa undang-undang yang dibentuk mampu menampung berbagai kenutuhan dan perubahan yang cepat, dalam pelaksanaan pembangunan.⁹

Mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak dapat dipisahkan. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁹ Yuliandari, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: Raja Grafindo 2013). h. 1.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

1. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian UU PKDRT

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Pola pikir yang konvensional. Pola pikir yang konvensional tersebut adalah cara berfikir yang melihat bahwa ranah rumah tangga sebagai wilayah otoritarian privat, sehingga hukum publik dianggap tidak bisa turut campur terhadap apapun yang terjadi di dalamnya.
2. Kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi substansi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kalangan para masyarakat. Sudah lazim dialami kesulitan-kesulitan dalam penggunaan suatu produk Undang-Undang yang disebabkan ketidaktahuan isi akan Undang-Undang tersebut.
3. Korban masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang berakibat luka serius saja yang bisa dilanjutkan perkaranya. Sedangkan untuk kekerasan yang lain seperti kekerasan fisik yang lukanya ringan, psikologis, seksual, kekerasan ekonomi dan penelantaran dalam rumah tangga tidak ada keinginan untuk melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak mendapat luka yang serius.

4. Faktor hukumnya sendiri. Kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan Pasal 15 UU PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan-tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan delik aduan tetapi delik pidana umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Manggala tidaklah berjalan secara optimal. Undang-Undang mengalami berbagai permasalahan dalam penerapannya sehingga tidak berjalan secara efektif. Salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada tidak adanya aturan yang mengatur seperti berapa lama dia harus bekerja dalam sehari hari, hari apa saja dia boleh libur dan tidak adanya standar gaji si pembantu rumah tangga yang disinggung dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
2. Faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Manggala yaitu, Pola pikir yang konvensional, Kurangnya sosialisasi, kurangnya keterbukaan mengenai masalah yang dialami, kurangnya pengetahuan mengenai hak-haknya sebagai pekerja, dan Hukumnya sendiri. Selain dari beberapa hal di atas yang memicu terjadinya kekerasan pada pembantu rumah tangga adalah diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperbaharui atau menambahkan suatu peraturan yang didalamnya tidak saja sebatas untuk melindungi perempuan yang berstatus isteri saja namun juga suami dan juga anak serta orang-orang lain yang mempunyai hubungan tertentu khususnya pembantu rumah tangga yang kerap menjadi korban kekerasan.
2. Salah satu cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban KDRT terkhusus kepada pembantu rumah tangga adalah korban perlu mengubah pola pikir mereka yang masih banyak beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga adalah hal yang wajar. Kemudian pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada setiap pembantu rumah tangga agar mereka memahami bahwa apa saja sih yang menjadi hak-haknya dan bagaimana mekanismenya ketika mereka mengalami kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- A. Ubaedillah dan Abdul Razak. *Pancasila, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah 2010).
- Anti, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Wawancara, 7 Februari 2018).
- Ati, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Wawancara, 7 Februari 2018)
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: 2011).
- Departemen Sosial RI, *Standar Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan* (Jakarta Perpustakaan Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja migrant, 2003).
- Erni, korban KDRT di kelurahan manggala, 9 November 2018.
- Fakih Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995).
- Lihat Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).
- Megawangi Ratna, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999).
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang: 2010).
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi, kajian sosiologi terhadap Kriminalitas, Pelaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Fisip UI Press, 2007)
- Rifka Annisa, *perempuan mencari keadilan* (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2007)
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2009).

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis). (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006).

R. Soeilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) (Politeia Bogor).

Secretariat jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: MPR RI, 2015).

Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, *Gender dan Inferioritas perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 1986).

Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

Wade Darma, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Wawancara pembantu rumah tangga di kelurahan borong 8 february 2018.

Wawancara dengan Mba Ross di kelurahan Manggala, 10 November 2018.

Yuliandari, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: Raja Grafindo 2013).

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konvensi Organisasi Buruh Dunia (ILO) Nomor 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak pekerja rumah tangga

Sumber-Sumber Lain :

<https://www.kumpulanmakalah.com/2016/11/kekerasan-rumah-tangga-dalam-perspektif.html>. Diakses pada 10 september 2018, pukul 23:10 wita.

<http://kamilia-milestones.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-terhadap-kekerasan.html>. Diakses pada 12 september 2018, pukul 22: 33 wita.

Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, pada situs <http://www.uninus.ac.id>, diakses pada 29 April 2018.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6592>. diakses pada 13 april 2019

<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v2i2.4002> diakses pada 7 juli 2019. Pukul 01:15 wita.



RIWAYAT HIDUP



Suriyadi, S.H. Di lahirkan di Desa Lautang Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 10 September 1994. Anak ke 4 dari 5 bersaudara. Buah hati pasangan Kaharuddin dan Suriyani.

Menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2018. Pengalaman Organisasi sejak dibangku kuliah yakni diamanahkan menjadi Koordinator Komunitas **YouthCare** (Pendamping Sebaya Korban Kekerasan Anak dan Perempuan) Makassar Periode 2014-2015. Kemudian Menjadi Anggota **HIPERMAWA** (Himpunan Mahasiswa Wajo). Kemudian Menjadi Anggota **MBH** (Mahasiswa Berpendidikan Hukum). Prinsip hidupnya adalah *masalah prinsip hidup nanti kita bicarakan lagi, mungkin dengan ngopi misalnya.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R